DEMOKRASI DALAM PANDANGAN KRISTEN

Yushak Soesilo¹

Abstraksi

Demokrasi merupakan sistem kekuasaan yang semakin populer di era modern ini. Demokrasi adalah sistem kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi untuk mengatur dan menentukan jalannya kehidupan bernegara. Dalam sejarah politik Indonesia, demokrasi sudah diterapkan sejak kemerdekaan, dan pada kenyataannya adalah merupakan sistem yang didukung oleh umat Kristen. Umat Kristen bahkan berpartisipasi aktif untuk mendorong dan memajukan demokrasi. Namun demikian diperlukan suatu kajian sejauh mana seharusnya umat Kristen terlibat dalam demokrasi. Kajian yang dilakukan adalah meliputi apakah prinsip-prinsip demokrasi itu sebenarnya, bagaimanakah pandangan Alkitab, sebagai sumber kebenaran bagi umat Kristiani, terhadap demokrasi, dan bagaimana juga pandangan tokoh-tokoh Kristen terhadap demokrasi. Hasilnya disimpulkan bahwa umat Kristen patut untuk mendorong penerapan demokrasi karena prinsip utama demokrasi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia maupun terhadap keberagaman. Namun mengenai prinsip mayoritas dalam demokrasi, umat Kristen tetap harus bersikap kritis, bahwa suara mayoritas tidak selalu merupakan kebenaran.

DEMOCRACY IN CHRISTIAN VIEW

Abstract

Democracy is a popular power system in this modern period. Democracy is people sovereignty in which sovereignty of people holding the highest in running and controlling their state. In Indonesia political history, democracy is always implemented since Indonesia independence, and in fact, is supported by Indonesia Christian as well. The Christian even has active participation in endorsing democracy. However, analysis is needed in setting Christian position before democracy. The study was conducted on the democracy principal, biblical study of democracy, and the Christian leader view to democracy. The result concluded that the Christian need to endorse democracy due to the main democracy principal is respect to the human right and diversity. However on the principle in majority, the Christian has to be critical, that the majority is not always the truth.

Keywords: demokrasi, prinsip demokrasi, Alkitab

¹STT "Intheos" Surakarta (yushak@stintheos.ac.id)

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu sistem kekuasaan yang sangat populer di era modern ini. Data dari Wikipedia menyebutkan bahwa pada tahun 2011 sistem kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini dianut oleh 78 negara.² Fakta tersebut menunjukkan bahwa demokrasi semakin diterima oleh negara-negara di seluruh dunia.

Indonesia sendiri sudah menganut paham demokrasi sejak merdeka. Beberapa varian demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia antara lain, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Dalam rangka penerapan demokrasi tersebut, Indonesia juga telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum yang diselenggarakan pada era orde lama diikuti oleh banyak partai politik (multi partai), sedangkan pemilu pada era orde baru hanya diikuti oleh tiga partai politik sebagai akibat dari penyederhanaan partai politik yang mengikuti pemilu, dan pada era reformasi Indonesia kembali menganut sistem multi partai. Pemilihan presiden dan kepala daerah juga telah mengalami perubahan. Jika sebelum era reformasi

diterapkan model demokrasi perwakilan, dimana presiden dan kepala daerah dipilih oleh parlemen, maka pada era reformasi diterapkan model demokrasi secara langsung, di mana presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, umat Kristen juga merasakan penerapan demokrasi di Indonesia, dan bahkan tidak jarang terlibat aktif dalam kegiatan politik di Indonesia, meskipun tidak selalu sebagai anggota partai. Keikutsertaan tersebut diwujudkan dengan kegiatan dukung mendukung partai politik atau calon pemimpin negara yang menjadi pilihannya melalui berbagai media. Melihat keterlibatan aktif dalam berdemokrasi, dapat dikatakan bahwa umat Kristen mendukung penerapan demokrasi di Indonesia di tengah-tengah kenyataan bahwa ada sebagian warga negara Indonesia yang menolak penerapan demokrasi. Oleh sebab itu perlu dikaji seberapa jauh keterlibatan umat Kristen seharusnya dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

DEMOKRASI

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (*dēmokratía*), yang berarti “kekuasaan

² “Negara”,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#Negara>

rakyat.”³ Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diselenggarakan oleh sebagian besar rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Sistem demokrasi berbeda dengan sistem monarki maupun sistem aristokrasi. Sistem pemerintahan monarki memberikan kekuasaan hanya pada satu individu saja, sedangkan sistem pemerintahan aristokrasi menyerahkan pemerintahan untuk diatur oleh segelintir orang dari kelompok elit yang dianggap memiliki keistimewaan. Menurut Saut Sirait, “prinsip yang mendasari demokrasi adalah kesadaran tentang adanya kecakapan yang berbeda dan keyakinannya bahwa tidak semua orang dapat memerintah.”⁴

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan dan mengatur sendiri kehidupan mereka. Definisi demokrasi yang secara luas dikenal oleh masyarakat adalah seperti definisi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, “*the government of the people, by the people and for the people.*” Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Ir. Joko Widodo, dalam debat capres 2014, mendefinisikan demokrasi sebagai mendengarkan suara rakyat, dan melaksanakannya.⁵ Dengan demikian yang menjadi pusat dari demokrasi adalah rakyat itu sendiri.

Demokrasi adalah pelaksanaan kedaulatan penuh di tangan rakyat. Namun demikian, tidak serta merta bahwa rakyat memegang kebebasan yang mutlak. Kebebasan secara mutlak hanya akan berakibat pada terjadinya anarkisme atau yang lebih dikenal sebagai tirani mayoritas, di mana kelompok mayoritas akan bertindak sewenang-wenang, karena demokrasi diartikan sebagai kekuasaan di tangan rakyat mayoritas semata. Demokrasi di dalamnya mengandung prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, sehingga terwujud suatu sistem pemerintahan bagi kebaikan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Franz Magnis-Suseno mengemukakan prinsip-prinsip dasar negara demokrasi yang disebutkan dalam lima gugus ciri hakiki negara demokratis, yaitu: negara hukum,

³“**Demokrasi**”,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

⁴Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 34.

⁵ “*Jokowi: Demokrasi adalah Mendengarkan Suara Rakyat*”,
<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/10/jokowi-demokrasi-adalah-mendengar-suara-rakyat>, Selasa, 10 Juni 2014 02:51 WIB

pemerintah yang di bawah kontrol masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁶ Hukum merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam suatu negara, bukan hanya negara demokrasi saja namun juga dalam bentuk negara lainnya seperti monarki atau aristokrasi. Perbedaan hukum di negara demokrasi dengan negara yang menganut bentuk pemerintahan selain demokrasi adalah bahwa di negara demokrasi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Hukum dalam negara demokrasi menjamin hak-hak asasi warga negara. Pemerintah yang terpilih tidak akan dapat bertindak sewenang-wenang, dan sebaliknya rakyat juga tidak dapat dihukum tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang berisi perwakilan dari rakyat untuk merancang hukum, eksekutif adalah lembaga yang menjalankan hukum, sedangkan yudikatif berperan menjaga tegaknya hukum. Hukum mendistribusikan kekuasaan kepada ketiga lembaga tersebut, sehingga tidak

terjadi kekuasaan hanya ada pada tangan seseorang atau sekelompok orang saja. Hal tersebut akan menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Negara demokrasi juga membuka ruang bagi adanya kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Secara tidak langsung kontrol dari masyarakat tersebut dijalankan melalui parlemen yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Di Indonesia, parlemen dapat membuat panitia khusus untuk menginvestigasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Parlemen juga dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pendukung pemerintah dan kelompok oposisi terhadap pemerintah. Keberadaan oposisi tersebut adalah untuk mengimbangi pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang menyimpang oleh karena kekuasaan yang dipegangnya terlalu besar.

Kontrol secara langsung dari masyarakat terhadap pemerintah atau para politisi adalah melalui kritik yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat. Dalam negara demokrasi, demonstrasi adalah suatu cara yang umum dipakai untuk menyampaikan kritik. Warga negara diberi kebebasan untuk berunjuk rasa menyampaikan pemikiran mereka sepanjang masih

⁶ Franz Magnis-Suseno SJ, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 58.

dalam batas hukum yang berlaku. Warga negara juga bebas untuk mengekspresikan kehendak mereka dengan cara membentuk perkumpulan-perkumpulan, perserikatan-perserikatan yang memiliki kesamaan pandangan atau ideologi yang mereka anut. Melalui perkumpulan tersebut mereka dapat membangun opini-opini yang mungkin akan dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Untuk dapat menyampaikan opini maupun kritik secara langsung jelas masyarakat membutuhkan peran media. Dalam negara demokrasi, kebebasan bagi media untuk menyampaikan informasi dan kritik dijamin bahkan dilindungi. Pada era sekarang ini masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai apapun yang terjadi di pemerintahan maupun di parlemen. Mereka dapat berdiskusi melalui media, dan kemudian juga menyampaikan opini maupun kritik mereka melalui media.

Kontrol masyarakat, menurut Nazaruddin Sjamsuddin, selain berguna untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam politik.⁷ Kontrol masyarakat tersebut berperan

juga dalam merumuskan kebijakan pemerintah.

Pilar penting lainnya dalam negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum memang tidak hanya diselenggarakan di negara demokratis saja, namun demikian ada azas-azas mendasar dari pelaksanaan pemilu yang dapat disebut sebagai pemilu yang demokratis. Azas pemilu yang demokratis sudah tercermin dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu yang demokratis dilaksanakan secara langsung, di mana rakyat langsung memberikan suaranya tanpa harus diwakilkan. Umum artinya pemilu diikuti oleh siapapun warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu. Bebas artinya setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya maupun tidak menggunakan hak pilihnya merupakan bagian dari azas bebas ini. Rahasia artinya bahwa pemilu berlangsung secara tertutup, di mana tidak ada orang yang boleh tahu akan pilihan seseorang. Oleh sebab itu proses pemilihan dilakukan di dalam bilik suara dan surat suara juga tertutup.

⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 187.

Jujur artinya bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari tahap pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan suara, tidak ada rekayasa untuk memenangkan salah satu pihak. Sedangkan azas adil artinya bahwa tidak ada diskriminasi bagi siapapun warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memberikan hak suaranya. Setiap warga negara tanpa membedakan mempunyai hak untuk memilih maupun untuk dipilih.

Demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat artinya bahwa rakyat yang mempunyai kehendak dalam menjalankan negara. Kehendak rakyat satu dengan yang lainnya memang dapat berbeda-beda. Dan oleh karenanya berlaku prinsip mayoritas dalam sistem demokrasi. Kehendak dari suatu kelompok masyarakat yang mayoritas itulah yang kemudian akan dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Cara populer untuk mengetahui kehendak mayoritas rakyat adalah melalui pemungutan suara atau voting. Voting digunakan untuk memutuskan suatu keputusan berdasarkan pada suara terbanyak yang memberikan dukungan.

Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi selain melalui voting

juga dapat melalui musyawarah mufakat. Berbeda dengan voting, musyawarah mufakat menghasilkan keputusan bulat karena telah dibicarakan bersama-sama dan keputusannya telah disetujui bersama-sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan musyawarah sebagai “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.”⁸ Sedangkan mufakat didefinisikan sebagai “setuju, seia sekata, sepakat, persetujuan bulat.”⁹ Musyawarah mufakat merupakan suatu cara berdemokrasi yang sangat dianjurkan dalam Pancasila, seperti yang termaktub dalam sila keempat Pancasila. Voting adalah jalan terakhir apabila permufakatan tidak tercapai. Di dalam musyawarah mufakat tidak selalu pendapat mayoritas yang akan disahkan sebagai suatu keputusan, namun pendapat yang dianggap paling baik dan memuaskan bagi seluruh anggota itulah yang akan ditetapkan sebagai suatu keputusan.

Negara demokrasi di dalamnya harus ada jaminan terhadap hak-hak demokratis warganya. Negara memberikan kebebasan warga untuk menyampaikan aspirasinya, untuk

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “*Musyawarah*”.

⁹ Ibid., “*Mufakat*”.

berserikat, untuk berkumpul, dan untuk menyatakan pendapatnya di muka umum. Dalam hal ini ada pengakuan dan perlindungan terhadap keanekaragaman. Roh dari demokrasi adalah menghargai perbedaan-perbedaan, di mana perbedaan-perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan tersendiri. Penghargaan terhadap keanekaragaman di Indonesia tercermin dalam semboyan negara “Bhineka Tunggal Ika”. Siapapun warga negara, meskipun minoritas, berhak dan dilindungi dalam mengaktualisasikan dirinya. Inilah esensi dari negara demokratis, yaitu penghargaan dan perlindungan terhadap kebhinekaan.

Demokrasi Dalam Alkitab

Referensi mengenai demokrasi secara eksplisit tentu saja tidak akan dapat ditemukan didalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hal tersebut karena ide mengenai demokrasi seperti yang diaplikasikan secara modern pada saat ini baru dikenal pada abad ke-5 SM di negara-negara kota Yunani, dan baru diaplikasikan dalam pemerintahan modern sekitar abad ke-19 M. Selain itu, Alkitab tentu tidak akan memaparkan mengenai sistem pemerintahan karena Alkitab hanya

akan menyatakan hal-hal teologis. Namun demikian, bukan berarti bahwa Alkitab anti terhadap kebudayaan. Alkitab bahkan memberikan kesaksian-kesaksian bagaimana Allah juga mempergunakan kebudayaan dalam karya-Nya. Budaya adalah hasil dari budi dan daya manusia, dan sistem demokrasi adalah juga merupakan kebudayaan dari suatu peradaban manusia. Berikut ini akan penulis paparkan mengenai penerapan sistem demokrasi di Alkitab menurut parameter prinsip-prinsip negara demokrasi dari Franz Magnis-Suseno.

Suatu sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dari hukum yang menempatkan manusia pada posisi yang sama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel memang tidak mengenal adanya parlemen sebagai lembaga pembuat undang-undang oleh karena Tuhan sendiri yang membuat undang-undang yang berupa hukum Taurat. Meskipun demikian William Dyrness menunjukkan bahwa hukum Taurat menempatkan semua orang sederajat dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, dan tidak terdapat perbedaan-perbedaan kelas.¹⁰ Setiap orang, baik itu raja, imam, nabi, maupun rakyat biasa

¹⁰ William Dyrness, *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 113

di Israel tidak ada yang memiliki perlakuan khusus di hadapan hukum. Hukum yang sama berlaku bagi semua orang di Israel, bahkan bagi orang asing.

Yahweh berperan sebagai lembaga legislasi yang menetapkan hukum di Israel. Imam kemudian mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan hukum tersebut kepada umat. Sedangkan para nabi, para imam, para hakim dan raja berperan sebagai pihak yang menegakkan pelaksanaan hukum serta mengadili adanya pelanggaran hukum. Di dalam masyarakat juga terdapat peran tua-tua kota yang melaksanakan ketetapan-ketetapan hukum serta mengadili perselisihan-perselisihan di antara rakyat (Ul. 19:12; 25:7-10; 21:19).¹¹

Kontrol sosial juga dapat ditemukan dalam kehidupan Israel pada era Perjanjian Lama. Kontrol tersebut berupa teguran, kecaman, dan sampai kepada ancaman penghukuman terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi baik yang dilakukan oleh raja maupun orang Israel pada umumnya. Namun demikian berbeda dengan kritik sosial di negara demokrasi, yang disampaikan melalui parlemen maupun opini masyarakat, kritik sosial di Israel

¹¹ *Ibid.*, hlm. 115.

disampaikan oleh Yahweh sendiri melalui nabi-nabi-Nya. Para nabi tersebut tidak menyampaikan pesan atas nama pihak yang tertindas misalnya, selayaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak untuk membela rakyat marjinal, namun mereka menyampaikan pesan atas nama Yahweh. Sebagai contoh dalam kasus Elia yang membela Nabot terhadap raja Ahab dan Izebel (1 Raj. 21) adalah didasarkan pada komitmen terhadap hukum-hukum Allah, bukan didasari atas kepentingan personal.¹²

Pesan yang disampaikan oleh para nabi tidak selalu berisi teguran terhadap adanya pelanggaran atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran tersebut, namun dapat juga berupa petunjuk bagaimana harus bertingkah laku maupun berupa berita pengharapan di masa yang akan datang.¹³ Dengan demikian, selain memberikan kritikan bagi raja dan orang Israel, nabi juga dapat menjalankan peran sebagai penasihat raja, seperti yang dilakukan oleh nabi Natan pada periode pemerintahan raja Daud. Peran yang dijalankan oleh para nabi tersebut menjadikan raja dan para penguasa di

¹² C. Hassell Bullock, *Kitab Nabi-nabi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2002), hlm. 33.

¹³ Andrew E. Hill & John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2004), hlm. 513.

Israel tidak dapat membuat kebijakan atau bertindak secara sewenang-wenang dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya. Apabila kesewenang-wenangan atau pelanggaran hukum terjadi maka siapapun di Israel tidak akan dapat lepas dari hukuman yang dijatuhkan oleh Yahweh.

Adanya hukum yang adil dan kontrol terhadap pemerintah tersebut bukan berarti bahwa kemudian Israel dalam era Perjanjian Lama menganut sistem demokrasi. Salah satunya adalah karena tidak adanya pemilihan umum yang bebas untuk memilih wakil di parlemen maupun pemimpin negara. Israel adalah negara teokrasi dengan bentuk kerajaan. Raja-raja yang memerintah dipilih langsung oleh Yahweh, seperti Saul, Daud, Yerobeam, dan beberapa raja di Israel Utara. Israel Selatan atau Yerusalem bahwa secara turun temurun diperintah oleh keturunan raja Daud oleh karena adanya perjanjian Allah dengan raja Daud (1 Taw. 17:11-14; 2 Taw. 7:17-18; 1 Raj. 11:30-32). Para hakim yang memimpin Israel sebelum adanya kerajaan juga dipilih langsung oleh Allah. Pengangkatan Yefta sebagai hakim di Israel oleh para tua-tua Gilead juga bukanlah suatu petunjuk bahwa sistem demokrasi dianut dalam Perjanjian Lama, karena hanya berlangsung secara

sporadis, bukan karena memang ada sistem pemilu, dan juga tidak ada pemilu secara terbuka yang melibatkan beberapa kandidat.

Meskipun merupakan negara teokrasi, namun bukan berarti bahwa aspirasi rakyat untuk memilih pemimpinnya sepenuhnya ditolak dalam Perjanjian Lama. Taurat bahkan memberikan ruang bagi kemungkinan pemilihan raja yang akan dilakukan oleh orang Israel. Ulangan 17:14-15 memberikan peluang bahwa suatu kali kelak bangsa Israel dapat mengangkat seorang raja dengan persyaratan bahwa ia haruslah berasal dari bangsa Israel sendiri, dan bukan merupakan orang asing. Artinya bahwa Perjanjian Lama tidak anti terhadap aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Tidak harus bersifat *top-down* tetapi dapat bersifat *bottom-up*, di mana rakyat tidak salah apabila menentukan pilihannya bagi seorang pemimpin selama tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Taurat dan menyadari bahwa pilihan final berada di tangan Allah.

Dalam lingkup yang lebih kecil, Perjanjian Baru juga memberikan bukti-bukti adanya pemilihan secara demokratis yang dikombinasikan dengan *top-down election*. Terpilihnya Matias untuk menggantikan posisi

Yudas sebagai murid Yesus adalah sebelumnya melalui proses usulan kandidat dari 120 orang yang hadir di suatu tempat di Yerusalem. Mereka mengusulkan dua nama yang kemudian setelah berdoa dan membuang undi terpilihlah Matias (Kis. 1:15-26). Demikian juga dengan pemilihan tujuh orang diaken untuk melakukan pelayanan meja juga melalui penyaluran aspirasi jemaat yang memilih para diaken tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh para rasul (Kis. 6:1-6). Setelah terpilih ketujuh orang yang memenuhi persyaratan, kemudian para rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka sebagai tanda pelantikan mereka untuk mulai bekerja.

Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan mulai munculnya ide demokrasi, maka gereja mula-mula juga mulai mengadopsi sistem tersebut. Jemaat diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan mereka dengan tetap menempatkan Roh Kudus sebagai penentu akhir kebenaran pilihan jemaat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Roh Kudus dapat memakai sistem demokrasi untuk menetapkan seseorang yang dipilih.

Pengambilan keputusan bersama melalui cara voting tentu saja tidak

dikenal dalam sejarah yang tercatat di Alkitab. Sejarah dalam Perjanjian Lama memang menyebutkan adanya cara membuang undi melalui Urim dan Tumim untuk mengambil suatu keputusan, namun hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kehendak Tuhan, bukan untuk mengetahui aspirasi mayoritas. Namun demikian, musyawarah mufakat diterapkan sebagai suatu cara perundingan dalam mengatasi suatu masalah. Musyawarah biasanya dilakukan dengan para tua-tua kota atau tua-tua orang Israel (2 Sam. 3:17; Rut 4:1-11).

Perjanjian Baru juga memberikan petunjuk tentang diadakannya permusyawaratan untuk mencapai kata mufakat. Kisah Para Rasul 15:1-29 mengisahkan bagaimana para rasul mengambil suatu keputusan untuk mengatasi persoalan yang muncul di antara orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Para rasul tersebut saling memberikan pendapatnya dalam suatu persidangan di Yerusalem hingga kemudian dicapai kata sepakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara-perkara yang tidak bersifat mutlak, maka musyawarah menjadi cara yang baik dan disetujui oleh Alkitab untuk dilakukan.

Demokrasi Dalam Pandangan Tokoh Kristen

Tidak dapat disangkal bahwa kekristenan merupakan lingkungan yang baik untuk lahir dan tumbuhnya demokrasi. Luther mendobrak kekuasaan mutlak gereja yang selama waktu itu telah menjadikan gereja sebagai kekuasaan tirani. Reformasi yang dilakukan oleh Luther, yang meskipun hanya pada tataran gereja, menjadi tonggak bagi penghargaan terhadap kebebasan individu, yang menjadi salah satu ciri dari demokrasi. Hal penting yang menjadi catatan dalam reformasi Luther adalah mulai dipisahkannya kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara.

Yohanes Calvin dapat dikatakan juga sebagai tokoh yang mendukung demokrasi. Calvin memang lebih setuju dengan konsep negara aristokrasi. Baginya monarki akan memungkinkan untuk menghasilkan pemimpin yang lalim, sedangkan demokrasi akan menghasilkan anarkisme, karena menyerahkan kekuasaan kepada banyak orang. Aristokrasi dianggap sebagai solusi tepat karena pemerintahan akan berada di tangan beberapa orang yang memiliki kemampuan dan sekaligus ada yang akan menjadi penyeimbang sebagai kontrol terhadap satu dengan yang lainnya. Kendati cenderung untuk

mendukung sistem aristokrasi, namun paling tidak pemikiran Calvin tersebut telah berkembang dalam bentuk demokrasi perwakilan. Demokrasi dengan sistem perwakilan tersebut banyak tumbuh dan berkembang di negara-negara tempat tradisi Calvinis yang paling kuat: Swiss, Belanda, Perancis, Inggris, Skotlandia, dan New England.¹⁴

KESIMPULAN

Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang dikenal dalam Alkitab. Namun demikian, tidak dikenal bukan berarti dilarang untuk diterapkan. Demokrasi adalah suatu hasil dari pemikiran manusia dalam suatu kurun sejarah, sedangkan Alkitab adalah untuk menyatakan karya Allah dalam sejarah. Oleh sebab itu tidak perlu dipaksakan bahwa demokrasi dianut dalam Alkitab, oleh karena memang tempat keduanya sangat berbeda. Latar belakang tumbuh dan berkembangnya sistem pemerintahan dalam Alkitab dengan sistem demokrasi juga berbeda. Sistem pemerintahan dalam sejarah Alkitab bersifat eksklusif, sedangkan dalam sistem demokrasi bersifat inklusif dan plural.

¹⁴ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama: Satu Nusa, Satu Bangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 136.

Sebagai hasil dari pemikiran manusia tentu saja Alkitab tidak serta merta menolaknya. Selama hasil pemikiran tersebut baik bagi kesejahteraan manusia, maka Alkitab memberikan lampu hijau untuk itu. Allah juga berkarya melalui kebudayaan manusia, dan sampai saat ini demokrasi adalah sistem yang paling baik untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya pluralis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Calvin bahwa pemerintahan di tangan lebih dari satu orang lebih baik daripada pemerintahan di tangan satu orang karena akan ada pihak yang mengawasi kekuasaan. Adanya semangat penghargaan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman menjadikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang ramah terhadap kekristenan, terutama di negara-negara yang minoritas Kristen, dibandingkan dengan sistem pemerintahan non-demokrasi. Di negara-negara yang menerapkan demokrasi dengan baik, maka kekristenan juga mendapatkan perlindungan untuk berkembang dan perlindungan dalam pekabaran Injil.

Demokrasi adalah berdasarkan kepada suara mayoritas, sehingga muncul slogan “suara rakyat suara Tuhan”. Dalam hal ini tentu kekristenan harus bersikap kritis. Kekristenan tidak

dapat menganggap bahwa suara mayoritas sudah pasti benar. Seseorang seringkali memanfaatkan gerakan massa demi menunjukkan bahwa dirinya benar, meskipun sebenarnya tidaklah demikian. Atau sebaliknya, di dalam demokrasi kebenaran dapat saja kalah oleh karena hanya didukung oleh sedikit orang. Nilai kebenaran seharusnya tetaplah kebenaran terlepas didukung oleh banyak atau sedikit orang. Namun dalam demokrasi suara mayoritas adalah “kebenaran”. Meskipun mendukung demokrasi, karena merupakan sistem terbaik sampai saat ini, namun partisipasi didalam demokrasi adalah untuk memperjuangkan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bullock, C. Hassell *Kitab Nabi-nabi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2002.
- Dyrness, Wiliam. *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi: Sebuah Wacana Pembangunan Politik*. Yogya: Tiara Wacana, 1998.
- Hill, Andrew E dan John H. Walton. *Survei Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Howard Jr, David M. *Kitab-kitab Sejarah dalam Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2002.
- Sirait, Saut. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.

- Sjamsuddin, Nazaruddin. ***Dinamika Sistem Politik Indonesia***. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Suseno, Franz Magnis. ***Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis***. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Yewangoe, Andreas A. ***Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila***, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
-
- _____. ***Tidak Ada Negara Agama: Satu Nusa, Satu Bangsa***. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.